

PERILAKU PEMILIH WARGA DESA GOLONGAN MUDA DAN GOLONGAN TUA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA

VOTER BEHAVIOR OF YOUNG AND OLD GROUP VILLAGERS IN VILLAGE HEAD ELECTIONS

Saverinus Rio Jama*, Suko Wiyono, Nuruddin Hady

Program Studi Magister Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Malang
Jalan Semarang Nomor 5 Malang 65145, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima : 27 November 2020

Disetujui : 26 Desember 2021

Keywords:

voter behavior, political education, village head election

Kata Kunci:

perilaku pemilih, pendidikan politik, pemilihan kepala desa

***) Korespondensi:**

E-mail: saverinusriojama@gmail.com

Abstract: this study aimed to analyze the portrait, shape, and strengthening of the voting behavior of villagers and the political education of young and old villagers in the election of village heads. This study used a case study qualitative approach with observation, interviews, and documentation as data collection techniques. The results showed that the portrait of villager voting behavior in the village head election was seen through the use of voting rights, material and physical support, and participation in village deliberations. The form of the voting behavior of villagers in the village head election is included in the categories of novice voters, sawing voters, floating masses, and permanent voters. Strengthening the voting behavior of villagers in the election of village heads was carried out through socialization carried out by village officials, contestants, volunteers, churches, and the committee of the voting group. The political education of young villagers in the election of village heads was obtained from various online media, while the older group received political education from print media.

Abstrak: kajian ini bertujuan menganalisis potret, bentuk, dan penguatan perilaku pemilih warga desa serta pendidikan politik warga desa golongan muda dan golongan tua dalam pemilihan kepala desa. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis studi kasus dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potret perilaku pemilih warga desa dalam pemilihan kepala desa tampak melalui penggunaan hak suara, dukungan materi dan fisik, serta partisipasi dalam musyawarah desa. Bentuk perilaku pemilih warga desa dalam pemilihan kepala desa termasuk dalam kategori pemilih pemula, pemilih pindah haluan, massa mengambang, dan pemilih permanen. Penguatan perilaku pemilih warga desa dalam pemilihan kepala desa dilakukan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh aparat desa, kontestan, relawan, gereja, dan panitia kelompok penyelenggara pemungutan suara. Pendidikan politik warga desa golongan muda dalam pemilihan kepala desa diperoleh dari berbagai media *online*, sedangkan golongan tua memperoleh pendidikan politik dari media cetak.

PENDAHULUAN

Perilaku pemilih berdasarkan pendapat para pakar ilmu politik memiliki esensi sebagai suatu tingkah laku individu dalam pemungutan suara terutama pada kegiatan pemilihan umum (pemilu). Pemimpin yang dipilih di Indonesia dalam konteks demokrasi tidak hanya dianggap sebagai persoalan politik, ekonomi, atau sosial, akan tetapi juga berkaitan dengan nilai-nilai etis seperti kesopanan dari kandidat sebagai pertimbangan pilihan yang dapat mengubah perilaku pemilih (Fuad, 2014). Studi mengenai perilaku pemilih secara eksplisit membahas mengenai alasan dan faktor yang memengaruhi seorang pemilih satu partai atau kandidat tertentu yang terlibat dalam kontestasi politik. Perilaku pemilih ditinjau dari pemilihan kepala desa (pilkades) merupakan konteks demokrasi yang paling nyata di tingkat desa.

Perilaku pemilih selain dipandang sebagai tingkah laku individu juga diartikan sebagai pendidikan pemilih. Hal ini berkaitan dengan penyebaran informasi dan materi yang bertujuan memberi gambaran kepada pemilih tentang hal-hal spesifik atau mekanisme dari proses pemilihan (Khoban, 2019). Tujuan perilaku pemilih dalam pemilu yaitu memberikan informasi penting untuk lembaga Pemilu dan pembuat kebijakan agar mempertimbangkan pilihan kebijakan yang efektif di masa yang akan datang (Mann & Bryant, 2020). Pengetahuan politik yang kurang dapat menyebabkan seseorang tidak mampu memberikan kriteria untuk calon pemimpin yang akan dipilih (Dupont dkk., 2019). Praktik pemilu banyak dimanipulasi sedemikian rupa sehingga dapat mengakibatkan konflik yang mampu mengurangi legitimasi (Berman dkk., 2019). Perilaku pemilih dipengaruhi oleh pengetahuan politik yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam menentukan kriteria pemimpin yang diharapkan.

Fokus kajian yang pertama yaitu tentang perilaku pemilih warga negara melalui partisipasi politik. Partisipasi politik yang dilakukan melalui pemilu dapat menyebabkan rendahnya jumlah partisipasi pemilih, sehingga pelaksanaan pemilihan serentak menjadi salah satu solusi dari persoalan tersebut (Garmann, 2017). Pemilu dalam demokrasi lama merupakan suatu kebiasaan yang diperoleh secara bertahap melalui proses yang dimulai dari bentuk pemberian suara, yang kemudian dijadikan sebagai salah satu sumber

daya warga negara dalam partisipasi politik dalam mengidentifikasi pengetahuan politik (Czesnik, Zerkowska-Balas, & Kotnarowski, 2013). Pemilu serentak dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan jumlah partisipasi politik.

Fokus kajian yang kedua yaitu tentang faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih warga negara melalui partisipasi politik. Pemangku kepentingan seperti politisi, praktisi, dan pembuat kebijakan memanfaatkan berbagai media untuk melakukan pemasaran politik diantaranya yaitu melalui berita dan wacana. Hal ini dijadikan sebagai salah satu kekuatan politik yang mampu mempengaruhi perilaku pemilih (Colladon, 2020). Perilaku pemilih juga dipengaruhi oleh kecerdasan emosional, salah satu contohnya terlihat dari sifat politik negatif dari seorang kandidat yang dapat mengubah persepsi politik para pemilih (Utami, Bangun, & Lantu, 2014). Media dapat dimanfaatkan sebagai salah satu perantara sosialisasi politik yang efektif.

Fokus kajian yang ketiga yaitu tentang pengetahuan politik warga negara. Warga negara golongan tua dan golongan muda memiliki perilaku memilih yang berbeda satu sama lain, karena disebabkan oleh pengalaman politik yang berbeda antara keduanya (Wang, 2019). Kategori golongan muda memiliki kisaran usia antara 12 hingga 25 tahun, sedangkan kategori golongan tua memiliki kisaran usia di atas 25 tahun (Li, 2020). Pertimbangan pilihan dalam konteks pemilu seperti pilkades selain dipengaruhi oleh nilai etis seperti kesopanan dan integritas dari kandidat yang bersangkutan, tetapi juga cenderung dipengaruhi oleh kedekatan emosional antara pemilih dan kandidat tersebut (Fuad, 2014). Perilaku pemilih golongan muda dan golongan tua dipengaruhi oleh pengalaman dan orientasi yang berbeda antara kedua golongan tersebut.

Perilaku pemilih saat ini dapat diidentifikasi melalui keterlibatan warga negara dalam aktivitas politik, salah satunya Pilkades. Hal ini dipandang sebagai keprihatinan warga negara terhadap keberlangsungan negara sebagai representasi dari hasil penerapan kebijakan sebelumnya (Cheung, Ma, & Chan, 2019). Tuntutan pasca reformasi yang menjadi perhatian publik yaitu demokratisasi politik yang ditandai dengan lahir dan menguatnya peranan partai politik dan masyarakat sipil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Perdana, 2019). Perilaku

pemilih juga dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan yang memainkan peran penting untuk membentuk gagasan dan keyakinan seseorang dalam menentukan pilihan politik (Li, Xi, & Yao, 2019). Upaya demokratisasi politik tidak terlepas dari aspek pendidikan, terutama upaya pendidikan politik yang diterapkan melalui partai politik.

Perilaku pemilih seseorang dalam suatu pemilihan dipengaruhi oleh kepribadian yang berdampak pada hasil pemilihan. Kepribadian tersebut diantaranya yaitu karakteristik pendidikan, gender, usia, keterbukaan pengalaman, dan emosional (Scott & Medeiros, 2020). Partisipasi dalam konteks politik berkaitan dengan perilaku pemilih yang terfokus pada pemilihan di suatu negara secara eksplisit (Ciornei & Ostergaard-Nielsen, 2020). Suara partai pada berbagai implikasi pemilihan dipengaruhi oleh tingkat partisipasi yang rendah, perbedaan potensial dalam preferensi partai, dan jumlah pemilih (Remer-Bollow, Bernhagen, & Rose, 2019). Partisipasi pemilihan juga dipengaruhi oleh asas kedaerahan seperti fitur geografis, fungsional, dan sosio demografis (Lappie & Marschall, 2018). Perilaku pemilih menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi hasil pemilihan.

Partisipasi politik saat ini mengalami peningkatan yang signifikan sebagai salah satu bentuk kemajuan demokrasi. Perilaku pemilih dapat diukur dengan beberapa kriteria, diantaranya yaitu partisipasi pemilih, pemilihan tidak sah, orientasi, dan kepercayaan pada parlemen (Gaebler, Potrafke, & Roesel, 2020). Variasi pada level individu dan agregat tingkat partisipasi pemilih telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir (Cancela & Geys, 2016). Pemilu menawarkan momen istimewa terutama dalam demokrasi perwakilan (Hooghe & Stiers, 2016). Kemajuan demokrasi yang ditandai dengan peningkatan partisipasi politik menjadi acuan dalam pelaksanaan suatu pemilihan.

Pembinaan warga negara sebagai salah satu pihak yang terlibat secara kritis dalam suatu pemilihan merupakan pilar utama pembangunan dan demokrasi. Hal tersebut menjadi bukti terkait peran, fungsi, dan tantangan yang dihadapi masyarakat sipil dalam upaya untuk menetapkan ruang publik demokrasi (Hammett & Jackson, 2018). Partisipasi politik dibagi menjadi tiga kategori, diantaranya yaitu partisipasi suara, partisipasi sukarela seperti kegiatan sipil lembaga

swadaya masyarakat (LSM), serta partisipasi campuran (Fan & Yan, 2019). Pengembangan kompetensi sipil merupakan salah satu kompetensi utama bagi warga negara, agar mampu bertindak secara demokratis serta berpartisipasi secara aktif dalam lingkup kehidupan sosial dan politik (Predescu & Darjan, 2010). Partisipasi aktif merupakan bagian dari kompetensi sipil yang harus dimiliki oleh setiap warga negara untuk menunjang pelaksanaan demokrasi.

Kajian ini memiliki perbedaan dengan kajian terdahulu karena dilakukan berbasis perilaku pemilih sebagai bentuk partisipasi politik golongan tua dan golongan muda dalam pilkades. Kajian terdahulu berfokus pada beberapa aspek, diantaranya yaitu peranan tokoh agama dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat, pendidikan pemilih, demokrasi lama, keterlibatan sipil, peran media dalam demokrasi, dan pengalaman politik. Kajian ini dilakukan dengan lebih eksplisit mengenai potret, bentuk, dan penguatan perilaku pemilih serta penerapan pendidikan politik warga negara di tingkat desa.

METODE

Metode yang digunakan dalam kajian ini yaitu kualitatif deskriptif dengan jenis studi kasus. Lokasi penelitian ini yaitu di Desa Orong Kecamatan Welak Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur. Subjek dalam penelitian ini adalah golongan tua, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan golongan muda perempuan dan laki-laki di desa. Pengumpulan data dalam kajian ini dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi kualitatif secara fundamental bersifat naturalistik, yang secara natural diterapkan pada setiap pelaku dalam suatu fenomena yang bersangkutan (Densin & Lincoln, 2009). Observasi yang dilakukan dalam kajian ini yaitu observasi partisipatif, observasi terstruktur, dan observasi terstruktur. Teknik wawancara dalam kajian ini dilakukan secara terstruktur, yang dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman pada kisi-kisi pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya (Creswell, 2016). Wawancara dilakukan pada beberapa informan, diantaranya yaitu golongan muda, golongan tua dari tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah desa. Dokumentasi yang dimaksudkan dalam kajian ini yaitu berkaitan dengan data, dokumen, file, audio, dan gambar

yang dapat menjawab rumusan masalah. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potret Perilaku Pemilih Warga Desa Golongan Muda dan Golongan Tua dalam Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan Kepala Desa (pilkades) yang dijelaskan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 dilakukan secara serentak satu kali atau dapat juga dilakukan secara bergelombang. Pasal 1 ayat (13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pemilih adalah penduduk suatu desa yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pilkades. Perilaku pemilih dalam pilkades ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara spesifik berkaitan dengan kewenangan desa. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, serta pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Pilkades menjadi salah satu bagian dari kerangka mekanisme demokrasi di Indonesia. Pelaksanaan pilkades didasarkan pada lima hal, yaitu: (a) respon terhadap tuntutan aspirasi masyarakat, (b) lahirnya perubahan pada level kelembagaan yang mendorong perubahan secara normatif, (c) sebagai proses pembelajaran demokrasi pada tingkat lokal, (d) salah satu spirit dalam penyelenggaraan dan aktualisasi hak otonomi daerah yang berupa hak memilih dan dipilih secara langsung, (e) sebagai proses pendidikan kepemimpinan bangsa pada setiap strata, dengan tujuan menciptakan kepemimpinan yang kuat (Riung, 2019). Pilkades perlu diselenggarakan untuk menunjang sistem demokrasi di Indonesia, khususnya di wilayah desa.

Potret perilaku pemilih warga desa berkaitan dengan gambaran nyata tentang aktivitas politik warga desa dalam pilkades. Kata potret dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai gambaran atau lukisan dalam bentuk paparan. Warga desa sebagai seorang pemilih

sangat mudah dipengaruhi oleh berbagai aspek ketika menentukan pilihan dalam kontestasi pilkades. Perilaku pemilih baik golongan muda maupun golongan tua dalam pilkades dipengaruhi oleh beberapa indikator, antara lain: budaya politik, pendidikan politik dan informasi politik, serta faktor pemilih itu sendiri.

Potret perilaku pemilih golongan tua dalam partisipasi politik terlihat dalam pemberian hak suara, dukungan materi, fisik, serta keikutsertaan dalam musyawarah desa. Tokoh agama dalam hal ini pastor paroki juga ikut berpartisipasi dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan rohani yang berkaitan dengan upaya sosialisasi politik. Informasi politik yang diperoleh warga desa pada umumnya masih bersifat manual, selain itu pelaksanaan birokrasi di desa juga tergolong rendah dan kurang sistematis. Aparat desa juga banyak yang kurang memahami sistem kerja terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang. Hal ini terbukti dari tidak adanya surat keputusan ketika pemberhentian dan pengangkatan seksi-seksi di pemerintahan desa. Hal lain seperti tugas membuat laporan, penyuratan, memimpin sidang, menyusun program kerja, sampai pada program kerja setiap bidang sebagian besar hanya dikerjakan oleh kepala desa dan sekretarisnya saja.

Perilaku pemilih warga desa dipengaruhi oleh faktor fanatisme kesukuan dan kedekatan emosional yang masih melekat dalam diri masyarakat. Warga desa cenderung memilih kandidat kepala desa yang berasal dari suku sama atau satu garis keturunan. Hal ini tentu menimbulkan aktivitas politik golongan, karena memilih berdasarkan kelompok sosial dan norma-norma yang dianut (Fahmi & Fauzi, 2020). Kandidat dalam pilkades dapat memperoleh kemenangan apabila anggota suku dari kandidat tersebut berjumlah banyak. Faktor lain yang mempengaruhi perilaku pemilih yaitu kedekatan emosional antara kandidat dengan warga desa sebagai pemilih. Kandidat atau kontestan dengan pergaulan yang dianggap baik oleh warga desa menjadi faktor penunjang yang dapat menciptakan peluang sebagai kandidat terpilih.

Praktik politik berbasis suku dan pertimbangan emosional pada dasarnya merupakan suatu paradoks dalam perilaku memilih warga desa. Hal ini dikarenakan ketika seseorang memilih kandidat atau calon kepala desa di luar basis sukunya, maka orang tersebut akan dianggap

menjadi musuh politik dalam keluarga satu sukunya. Fenomena tersebut tentu dapat memicu terjadinya konflik horizontal antar keluarga, bahkan mampu menimbulkan konflik dalam skala besar. Warga desa sangat mudah diadu domba oleh isu yang disebar oleh oknum calon kandidat kepala desa dan tim suksesnya, karena pada dasarnya pemahaman politik masyarakat desa masih belum memadai.

Perilaku pemilih dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan, diantaranya faktor sosial, ekonomi, afiliasi etnik, tradisi keluarga, keanggotaan dalam organisasi, usia, jenis kelamin, pekerjaan, tempat tinggal, dan kelembagaan. Kategori dan faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih tersebut termasuk dalam pendekatan sosiologis. Potret perilaku pemilih warga desa secara teoritis termasuk dalam kategori pemilih tradisional. Pengaruh kelompok sosial dalam studi *voting behavior* memiliki dua variabel, yaitu variabel predisposisi sosial ekonomi keluarga pemilih dan variabel predisposisi sosial ekonomi pemilih. Variabel tersebut memiliki hubungan yang signifikan dengan perilaku memilih dalam diri seseorang.

Perilaku pemilih yang bersifat kesukuan dan berdasarkan pada hubungan emosional (subjektif emosional) cenderung dipraktikkan oleh golongan tua dan golongan muda dengan tingkat pendidikan yang rendah. Golongan muda dikategorikan sebagai pemilih rasional karena mayoritas golongan muda berpendidikan (*well-educated*) hingga tingkat pendidikan tinggi. Pendidikan politik pada dasarnya bertujuan membentuk manusia menjadi partisipan yang bertanggung jawab secara politis melalui aktivitas yang terorganisir dan sistematis (Hermawan, 2020). Pendidikan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pengetahuan politik warga desa sebagai pemilih dalam pilkades.

Pendidikan politik berdasarkan pengalaman mampu meningkatkan pengetahuan warga desa, agar dapat berpartisipasi secara maksimal dalam suatu sistem politik. Warga negara diharapkan mampu menjalankan tugas untuk berpartisipasi secara maksimal dalam aktivitas politik, sebagai salah satu bentuk implementasi dari sistem kedaulatan rakyat dan demokrasi (Kurniasih, 2020). Pendidikan politik warga desa dilakukan dengan merekonstruksi nilai-nilai yang telah ada menjadi suatu sistem nilai baru, dengan harapan dapat menciptakan proses transformasi

pengetahuan dan pembentukan sikap menuju perubahan ke arah yang lebih baik.

Pendidikan politik warga desa meliputi dimensi kognitif, afektif, dan behavioristik yang dipengaruhi oleh faktor pendidikan. Golongan tua dan golongan muda tentunya memiliki perilaku memilih yang berbeda satu sama lain, baik dari segi persepsi politik, perilaku, dan orientasi politik. Pendidikan politik memiliki makna strategis untuk membentuk pengetahuan politik ke arah cerdas dan kritis dengan melibatkan semua kalangan. Pendidikan politik yang kurang memadai dapat memengaruhi orientasi politik warga desa, khususnya golongan muda dan golongan tua. Golongan muda yang mayoritas memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi dari golongan tua, cenderung berorientasi ke arah jangka panjang dalam bentuk pemberdayaan di segala bidang.

Potret perilaku pemilih warga desa juga dilaksanakan melalui pemberdayaan kelembagaan yang ada di desa. Hal ini menjadi salah satu wadah partisipasi warga dan pemerintahan desa dalam pembangunan, pemerintahan, serta kemasyarakatan dalam bentuk perencanaan, pengawasan, serta pelayanan (Winarni, 2020). Faktor penghambat dalam proses pemberdayaan kelembagaan di desa diantaranya kurangnya informasi, pemanfaatan teknologi yang minim, kualitas sumber daya manusia dalam hal ini aparat desa yang masih rendah, serta kurangnya pemahaman terkait tugas pokok dan fungsi masing-masing aparat desa. Pemberdayaan kelembagaan muncul karena dua premis mayor, yaitu kegagalan dan harapan. Kegagalan berkaitan dengan pembangunan sedangkan harapan timbul karena adanya alternatif-alternatif pembangunan dengan konsep nilai-nilai demokratis, persamaan gender, antar generasi, dan pertumbuhan ekonomi (Tjilen, 2019). Pemberdayaan kelembagaan sebagai wadah partisipasi pembangunan dan kemasyarakatan menjadi tugas utama pemerintah desa yang bersifat urgensi.

Pendidikan politik dan pemberdayaan kelembagaan pemerintah desa merupakan salah satu wadah pembangunan berkelanjutan terkait penataan birokrasi pemerintahan, yang dimulai dari struktur paling bawah yaitu desa. Pendidikan politik juga tidak terlepas dari sumber daya manusia, baik aparatur desa maupun masyarakat. Kendala yang sering dihadapi oleh pemerintahan desa yaitu minimnya sumber daya

manusia, sehingga menyebabkan pelaksanaan birokratisasi dan transparansi berdasarkan kaidah akuntabilitas menjadi terhambat. Hal ini menjadi faktor penghambat dalam proses digitalisasi dan partisipasi politik warga desa yang membutuhkan perhatian khusus dari berbagai pihak. Masyarakat yang berada dalam kelas bawah seperti warga desa perlu memperoleh pembangunan teknokrat dan pembangunan kemasyarakatan, karena modernisasi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dapat memperluas potensi partisipasi politik warga desa yang bersangkutan.

Bentuk Perilaku Pemilih Warga Desa Golongan Muda dan Golongan Tua dalam Pemilihan Kepala Desa

Bentuk perilaku pemilih dapat dilihat berdasarkan tiga pendekatan, yaitu pendekatan sosiologis, psikologis, dan pilihan rasional. Perilaku pemilih seseorang jika dilihat berdasarkan pendekatan sosiologis dipengaruhi oleh faktor lingkungan, yaitu sosial ekonomi, afiliasi etnik, tradisi keluarga, keanggotaan terhadap organisasi, usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan tempat tinggal. Pendekatan ini memandang agama, pendidikan, jenis kelamin, faktor geografis, budaya, dan faktor sosial sebagai suatu variabel yang dominan mempengaruhi seorang pemilih dalam menentukan pilihannya.

Bentuk perilaku pemilih secara psikologis dipengaruhi oleh beberapa aspek, yaitu ketertarikan seseorang terhadap partai politik serta orientasi terhadap calon atau kandidat dan isu-isu politik. Pendekatan pilihan rasional (*rational choice theory*) menjelaskan bahwa seseorang akan melakukan segala hal yang diyakini ketika dihadapkan pada beberapa jenis tindakan, karena dianggap dapat memberikan hasil terbaik. Hal ini mampu menjadikan seorang pemilih memiliki sikap aktif dalam suatu pemilihan (Valentina, 2009). Pendekatan pilihan rasional lebih menekankan pada faktor situasional yang berperan dalam mempengaruhi pilihan politik seseorang. Kausalitas perilaku manusia terkait tingkah laku, tindakan, dan pilihan politiknya tidak dapat dilihat pada satu aspek saja (Miaz, 2012). Pendekatan-pendekatan tersebut memiliki urutan kronologis yang jelas serta saling membangun dan mendasari satu sama lain.

Bentuk perilaku pemilih golongan muda dikategorikan menjadi empat, yaitu pemilih pemula (*beginner voters*), pemilih pindah

haluan (*swing voters*), dan massa mengambang (*floating mass*). Golongan muda termasuk dalam pemilih pemula yang rata-rata berusia 17-20 tahun. Pemilih pemula (*beginner voters*) memiliki pengetahuan politik yang kurang memadai karena tidak tertarik pada dunia politik, sehingga cenderung mengikuti pilihan orang lain tanpa dasar rasional yang jelas. Golongan muda juga termasuk dalam pemilih pindah haluan (*swing voters*), akan tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi peralihan pemilih menjadi kelompok pemilih tetap (*permanent voters*) karena termotivasi oleh akumulasi kekecewaan terhadap partai politik lama. Bentuk perilaku pemilih golongan muda yang selanjutnya yaitu massa mengambang (*floating mass*) yang tidak terikat pada partai politik tertentu karena belum menentukan pilihan.

Bentuk perilaku pemilih golongan tua memiliki perbedaan mendasar dengan golongan muda yang dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu pemilih tetap (*permanent voters*), pemilih pindah haluan (*swing voters*), dan massa mengambang (*floating mass*). Golongan tua sebagian besar termasuk dalam kategori pemilih pindah haluan dan massa mengambang, sedangkan kategori pemilih tetap hanya dimiliki oleh tokoh-tokoh masyarakat. Hal ini dikarenakan beberapa tokoh masyarakat di desa telah menjadi bagian dari partai politik, yang mampu berposisi secara ideologi sebagai konstituen permanen partai politik.

Orientasi politik warga desa golongan tua cenderung pada aspek ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Perilaku pemilih golongan tua lebih menekankan pada pendekatan ekonomi politik tradisional yang mengarah pada paham sosiologis, budaya, suku, dan ras. Warga negara yang aktif dalam perpolitikan menurut Hoskins dan Mascherini akan memperoleh nilai demokrasi (*democratic value*) dalam kehidupan di komunitasnya, diantaranya yaitu terlibat dalam pemberian suara pada pemilihan, bergabung dengan partai politik, menjadi relawan, serta mengikuti organisasi religi (Gofur & Sunarso, 2019). Perilaku pemilih dalam pendekatan ini dikembangkan berdasarkan konsep rasionalitas dan kepentingan diri seseorang.

Orientasi politik warga desa golongan muda lebih mengarah pada pengetahuan politik. Pengetahuan yang dimaksud berkaitan dengan perubahan isu, nilai, dan kecepatan kandidat

sebagai upaya mencari informasi dari hal-hal yang baru, rasa keingintahuan, kebosanan, atau kepuasan dengan proses pemilihan (Riung, 2019). Perilaku pemilih dalam mengambil keputusan politik berdasarkan teori pemecah masalah (*heuristic*) didasarkan pada empat aspek, yaitu *endorsement*, *familiarity*, *habit*, dan *viability*. *Endorsement* yaitu apabila seseorang memilih kandidat berdasarkan hasil rekomendasi dari kerabat dekat, elit politik yang terpercaya, atau kelompok sosial yang diikutinya. *Familiarity* yaitu apabila seseorang memilih kandidat yang telah dikenal atau diketahui sebelumnya. *Habit* yaitu ketika seseorang memilih kandidat berdasarkan pilihannya pada proses pemilihan sebelumnya. *Viability* yaitu ketika seseorang memilih kandidat yang mempunyai peluang menang lebih besar.

Praktik politik golongan muda dan golongan tua dalam pilkades dikategorikan sebagai politik identitas. Hal ini ditandai dengan adanya beberapa karakteristik, yaitu: (a) legitimasi identitas yang dibangun oleh institusi atau penguasa memiliki peran dalam masyarakat, (b) resistensi identitas yang disematkan oleh aktor sosial kelompok tertentu, (c) proyek identitas yang dimaknai sebagai atribut berdasarkan konstruksi identitas oleh aktor sosial dari kelompok tertentu (Suryani & Azmy, 2020). Pelaksanaan pilkades tidak terlepas dari politik identitas karena dalam proses tersebut mengandung aspek legitimasi, resistensi, dan proyek identitas.

Praktik politik warga desa dalam bentuk politik identitas dalam Pilkades salah satunya dipengaruhi oleh sosialisasi politik yang dilakukan kandidat, relawan, atau penyelenggara pemilihan. Sosialisasi politik diartikan sebagai suatu proses interaksi sosial baik secara kelompok atau individu yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan, sikap, nilai, dan perilaku esensial seperti keterlibatan (Nababan, Jekrina, & Pinem, 2019). Sosialisasi politik menurut Kenneth P. Langton merupakan pemberian pengetahuan dan pengalaman melalui transfer nilai, keyakinan, sikap, dan perilaku berdasarkan sistem politik yang ingin diteruskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya (Cahyani, 2019). Sosialisasi politik yang dilakukan dalam proses Pilkades berkaitan dengan sosialisasi undang-undang, penguatan organisasi muda, serta partisipasi masyarakat dalam dunia politik.

Politik identitas dan sosialisasi politik merupakan kriteria suatu bentuk perilaku pemilih warga desa golongan tua dan golongan muda dalam penyelenggaraan pilkades. Kedua kriteria tersebut memiliki peran yang sentral dalam hal partisipasi politik warga desa. Bentuk perilaku pemilih juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yang meliputi faktor sosiologis, psikologis, dan pilihan rasional yang saling mempengaruhi satu sama lain dalam proses pembentukan perilaku pemilih warga desa golongan muda dan golongan tua dalam pilkades.

Penguatan Perilaku Pemilih Warga Desa Golongan Muda dan Golongan Tua dalam Pemilihan Kepala Desa

Penguatan perilaku pemilih warga desa melalui partisipasi politik menjadi suatu tantangan bagi pemerintah dalam membentuk warga desa yang partisipatoris. Perilaku pemilih warga desa tidak dapat dikatakan rasional secara mutlak, karena dalam praktiknya didasarkan pada aspek sosiologis dan psikologis para pemilih. Penguatan perilaku pemilih warga desa dilaksanakan dengan menggunakan berbagai macam bentuk pendekatan. Pendekatan penguatan perilaku pemilih warga desa dipengaruhi oleh aspek psikososial dan budaya yang melekat pada masyarakat. Upaya penguatan perilaku pemilih warga desa dalam pilkades dilaksanakan melalui sosialisasi, baik dilakukan oleh aparatur desa, kontestan, relawan, gereja, maupun oleh panitia Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Upaya yang dilakukan oleh gereja terkait penguatan perilaku pemilih warga desa yaitu mengadakan kegiatan-kegiatan pencerahan politik agar masyarakat dapat memilih sesuai hati nurani. Gereja memiliki peran yang sangat dominan dalam memberikan konsep politik yang baik berlandaskan asas solidaritas, hal ini dikarenakan sekitar 98% warga Desa Orong merupakan penganut agama Katolik. Perilaku pemilih ditentukan oleh status sosial ekonomi, agama, dan daerah tempat tinggal. Kegiatan politik yang dilaksanakan oleh gereja menjadi salah satu bentuk penguatan berbasis agama terkait perilaku pemilih warga desa dalam penyelenggaraan Pilkades.

Sosialisasi politik gereja juga dilaksanakan melalui kegiatan katekese politik, yaitu suatu kegiatan dengan tujuan memberikan informasi

kepada warga desa agar dapat menentukan pilihan sesuai hati nurani. Kegiatan katekese politik yang dilakukan oleh gereja juga dimaksudkan untuk menghimbau agar kontestan tidak melakukan pelanggaran, terutama yang dapat menimbulkan kerusakan pada harkat dan martabat sesama manusia. Kegiatan-kegiatan politik gereja pada intinya bertujuan untuk memberikan gambaran dan arahan bagi semua pihak yang terlibat dalam pilkades dengan menekankan pada aspek solidaritas, kerukunan, kekeluargaan, kejujuran, keadilan, dan martabat.

Sosialisasi sebagai bentuk penguatan perilaku pemilih juga dilaksanakan berbasis kampanye yang dominan dilakukan oleh kandidat atau kontestan, relawan, dan warga desa dari golongan muda. Sosialisasi politik yang menjadi salah satu bentuk penguatan perilaku pemilih warga desa dalam pilkades secara teoritis diklasifikasikan sebagai upaya penguatan dalam lingkup mobilisasi politik. Mobilisasi politik dikategorikan dalam dua bentuk, yaitu mobilisasi langsung dan tidak langsung (Elwan, 2019). Mobilisasi langsung dilaksanakan dalam bentuk pengarahan kepada pemilih, agar dapat melakukan tindakan politik sebagaimana yang dikehendaki. Mobilisasi tidak langsung dilaksanakan dengan tujuan mempengaruhi pola pikir, sudut pandang, dan pemahaman pemilih dalam bentuk keputusan politik.

Mobilisasi langsung dilakukan dengan memberikan instruksi-instruksi kepada pemilih, diantaranya seperti sosialisasi langsung dalam bentuk kampanye terbuka untuk menggerakkan dan melakukan aksi politik. Mobilisasi tidak langsung dilakukan melalui media, diantaranya seperti kampanye dialogis, webinar, serta iklan *online* di media mainstream. Sosialisasi politik melalui berbagai media merupakan proses induksi ke dalam budaya politik berdasarkan pembelajaran sikap serta penanaman nilai yang diterima dari budaya politik dan subkultur politik untuk menciptakan kestabilan pemerintahan (Gafur, 2019). Pemahaman politik warga desa menjadi salah satu persoalan yang perlu diperhatikan dalam suatu pemilihan, karena cenderung memaknai perpolitikan dengan tujuan jangka pendek. Hal ini dipengaruhi oleh perbedaan orientasi dan faktor pendidikan politik warga desa yang belum memadai, sehingga menghambat proses pembangunan berkelanjutan oleh birokrasi pemerintahan desa dan elemen masyarakat dalam hal pemberdayaan sumber daya manusia di bidang politik partisipatif.

Perilaku pemilih warga desa golongan tua dan golongan muda secara tidak langsung dipengaruhi oleh lingkungan, mobilitas sosial, dan iklim politik yang sedang berjalan. Mobilisasi politik memegang peran sentral dalam konsep perilaku pemilih warga negara baik golongan tua atau golongan muda, terutama berkaitan dengan implikasi dalam suatu partisipasi politik (D'Hooge, Achterberg, & Reeskens, 2018). Pengaruh iklim politik terhadap perilaku politik baik eksternal maupun internal dibangun dan dipolitisasi sedemikian rupa untuk mengubah persepsi pemilih (Vinarski-Peretz & Kidron, 2018). Orientasi politik setiap pemilih tentu berbeda satu sama lain, tergantung pada aspek keterlibatan dalam politik serta lingkungan di sekitarnya (Cheung dkk., 2019). Hal ini sesuai dengan teori kognitif sosial yang mengasumsikan bahwa perilaku manusia dibentuk dan dikendalikan secara otomatis berdasarkan rangsangan lingkungan.

Perilaku pemilih warga desa dalam Pilkades menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terutama pemerintah desa. Perilaku pemilih dapat mempengaruhi kebijakan yang bertujuan untuk mengembangkan ekonomi, kelembagaan, tingkat pendidikan, dan pengalaman dalam pemilihan. Hal ini terlihat dari adanya kebiasaan dalam bentuk voting yang secara psikologis mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam berbagai macam bentuk pemilihan di masa yang akan datang. Perilaku pemilih tidak hanya ditinjau dari hasil pemilihan saja, akan tetapi juga dilihat dari keterlibatan atau keaktifan masyarakat sebagai representasi tugas kewargaan demokrasi.

Pendidikan Politik Warga Desa Golongan Muda dan Golongan Tua dalam Pemilihan Kepala Desa

Pendidikan politik merupakan bagian dari sosialisasi politik yang bertujuan membentuk nilai-nilai politik pada masing-masing warga negara, agar mampu berpartisipasi dalam sistem politik. Pendidikan politik melalui partisipasi politik dapat membentuk budaya politik partisipatif masyarakat yang ada di desa. Nilai-nilai budaya politik tersebut tidak terlepas dari proses filtrasi nilai-nilai budaya masyarakat di desa. Pendidikan politik pada hakikatnya bertujuan untuk membangun proses pendewasaan dan pemberdayaan seseorang terkait tanggung jawab individu dan kolektif melalui etika politik yang baik dan bertanggung jawab.

Warga desa golongan tua lebih banyak memperoleh pendidikan politik melalui partisipasi politik yang bersifat manual. Informasi politik hanya diperoleh dari media cetak seperti koran, baliho, dan papan iklan. Pendidikan politik juga diterapkan pada gereja yang lebih bersifat netral karena berlandaskan rasa saling menghormati dan menghargai harkat dan martabat sesama manusia dengan orientasi politik solidaritas. Pendidikan politik di desa pada umumnya diterapkan melalui nilai-nilai kekeluargaan, budaya atau tradisi masyarakat desa, serta agama.

Warga desa golongan muda lebih banyak memperoleh pendidikan politik melalui berbagai media *online*, tokoh masyarakat, orang tua, dan informasi yang bersifat isu. Kendala pendidikan politik di desa salah satunya yaitu terkait informasi publik seperti website termasuk media-media desa yang belum memadai. Literasi politik perlu dilakukan oleh warga desa golongan muda sebagai pemilih pemula, agar tidak menimbulkan berbagai permasalahan sosial politik seperti perilaku politik yang merusak bahkan propaganda kelompok anti demokrasi (Ridha & Riwanda, 2020). Pendidikan politik di desa saat ini dilakukan dengan melakukan pemberdayaan media seperti facebook, instagram, dan twitter dengan tujuan menyerap aspirasi masyarakat sebagai bagian dari pendidikan politik serta memberikan edukasi politik kepada warga desa.

Pendidikan politik warga desa termasuk dalam dua kategori, yaitu melalui nilai budaya dan media massa. Nilai budaya merupakan pola tingkah laku individu yang berorientasi pada kehidupan politik sebagai persoalan yang dihadapi oleh anggota suatu sistem politik (Suryana, 2020). Unsur kebudayaan berdasarkan teori fungsionalisme yang dikembangkan oleh Bronislaw Malinowski merupakan bagian masyarakat tempat unsur-unsur tersebut berada dengan menekankan bahwa setiap pola perilaku, kepercayaan, dan sikap menjadi bagian dari kebudayaan suatu masyarakat yang memiliki peran mendasar (Aditya dkk., 2020). Nilai budaya dalam praktik perpolitikan di desa sebagian besar sangat mempengaruhi orientasi politik, kecuali warga desa yang tergolong berpendidikan tinggi karena cenderung bersikap independen.

Pendidikan politik selain diterapkan melalui nilai budaya juga melalui media massa. Media massa adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak dengan

menggunakan alat-alat komunikasi mekanis (Hartati & Wahyuni, 2020). Kategori media massa meliputi media cetak, media elektronik, dan media *online*. Media massa sangat efektif dalam membentuk sikap, perspektif, perilaku, dan orientasi politik seseorang. Pendidikan politik sebagai salah satu upaya meningkatkan partisipasi politik sangat dipengaruhi oleh media, baik media cetak maupun media digital (Patmisari, Sumarsih, & Bambang, 2020). Media massa memiliki fungsi kontrol sosial yang di dalamnya termasuk aspek politik, sehingga mampu menghasilkan suatu perilaku pemilih dan partisipasi politik dengan orientasi politik warga desa yang berbeda satu sama lain.

Nilai budaya dan media massa merupakan bentuk penerapan pendidikan politik warga desa, baik golongan tua maupun golongan muda. Penerapan pendidikan politik di desa melalui media massa masih tergolong sangat minim, hal ini terbukti dari kurangnya penggunaan media *online* dan media elektronik khususnya bagi golongan tua. Pemberdayaan media terutama media *online* dan media elektronik pada pemerintah desa maupun warga desa, dijadikan sebagai salah satu syarat mutlak dari penerapan pendidikan politik di desa. Keberadaan media massa di era dengan prospek digitalisasi seperti saat ini dinilai sangat penting, karena menjadi salah satu upaya untuk menerapkan pendidikan politik dan informasi politik baik dalam bentuk konsep atau kaidah moral politik bagi warga desa.

Pendidikan politik melalui nilai budaya dan media massa dipandang sebagai budaya politik baru dalam aspek penerapan pendidikan politik di desa. Budaya politik dalam aplikasinya lebih mengedepankan aspek-aspek perilaku aktual berupa tindakan, serta aspek-aspek perilaku non-aktual seperti orientasi, sikap, nilai-nilai, dan kepercayaan. Budaya politik yang dijelaskan oleh Gabriel A. Almond merupakan suatu dimensi psikologis dari sistem politik yang mencakup beberapa komponen, meliputi struktur politik dan fungsi dalam sistem politik yang bersangkutan (Syuhada, 2020). Pendidikan politik berdasarkan aspek budaya politik diterapkan dengan empat orientasi, yaitu orientasi pada pemecahan masalah, orientasi terhadap aksi bersama, orientasi terhadap sistem politik, serta orientasi terhadap orang lain (Syuhada, 2020). Penerapan pendidikan politik pada hakikatnya bertujuan untuk mentransfer sikap, nilai, kepercayaan, dan tindakan dalam

sistem politik partisipatif dengan berdasar pada proses demokratisasi warga desa dari tingkat yang paling dasar.

SIMPULAN

Potret perilaku pemilih warga desa golongan muda dan golongan tua dalam pemilihan kepala desa dilakukan dengan menyalurkan hak suara, dukungan materi dan fisik, serta berpartisipasi dalam musyawarah desa. Bentuk perilaku pemilih warga desa golongan muda dan golongan tua dalam pemilihan kepala desa meliputi dua kriteria, yaitu berdasarkan pendekatan sosiologis dan pendekatan psikologis. Bentuk perilaku pemilih warga desa golongan muda dan golongan tua dalam pemilihan kepala desa termasuk dalam kategori pemilih pemula (*beginner voters*), pemilih pindah haluan (*swing voters*), massa mengambang (*floating mass*), dan pemilih permanen (*permanent voters*). Penguatan perilaku pemilih warga desa dalam pemilihan kepala desa dilakukan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh aparatur desa, kontestan, relawan, gereja, dan panitia kelompok penyelenggara pemungutan suara. Pendidikan politik warga desa golongan muda dalam pemilihan kepala desa diperoleh dari berbagai media *online*, yang didukung dengan adanya tokoh masyarakat, orang tua, dan informasi yang bersifat isu. Pendidikan politik warga desa golongan tua dalam pemilihan kepala desa diperoleh dari media cetak, seperti koran, baliho, dan papan iklan.

DAFTAR RUJUKAN

- Aditya, R. S., Ningrum, L. R., Fahrany, F., Kodriyah, L., & Mayasari, E. (2020). *Pengantar Antropologi Kesehatan*. Malang: Literasi Nusantara Abadi.
- Berman, Eli, Callen, Mike, Gibson, Clark, Long, James, & Rezaee. (2019). Election Fairness and Government Legitimacy in Afghanistan. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 168(1), 292-317.
- Cahyani, C. H. (2019). *Sosialisasi Politik dan Partisipasi Politik: Peran Kesbangpol terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Kota Depok Tahun 2018*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Cancela, J., & Geys, B. (2016). Explaining Voter Turnout: A Meta-Analysis of National and Subnational Elections. *Electoral Studies*, 42(1), 264-275.
- Cheung, C., Ma, S. K., & Chan, C. K. (2019). Linking Participation in Occupying Protest, Civic Engagement, and Approval of Government Among College Students in Hong Kong. *Social Science Journal*, 1(1), 17-30.
- Cheung, T. O. L., Ma, T. H. A., Lee, M. Y. K., Lee, C. K. J., & Lo, Y. L. (2019). How Does Political Orientation Influence One's Environmental Attitude and Behaviour? Debate Over Country Park Conservation in Hong Kong. *Environmental Science and Policy*, 99(1), 115-122.
- Ciornei, I., & Ostergaard-Nielsen, E. (2020). Transnational Turnout: Determinants of Emigrant Voting in Home Country Elections. *Political Geography*, 78(1), 102-112.
- Colladon, A. F. (2020). Forecasting Election Results by Studying Brand Importance in Online News. *International Journal of Forecasting*, 36(1), 414-427.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Czesnik, M., Zerkowska-Balas, M., & Kotnarowski, M. (2013). Voting as a Habit in New Democracies-Evidence from Poland. *Communist and Post-Communist Studies*, 46(1), 95-107.
- D'Hooge, L., Achterberg, P., & Reeskens, T. (2018). Imagining Class: A Study Into Material Social Class Position, Subjective Identification, and Voting Behavior Across Europe. *Social Science Research*, 70(1), 71-89.
- Densin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2009). *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Dupont, J. C., Bytzeck, E., Steffens, M. C., & Schneider, F. M. (2019). Which Kind of Political Campaign Messages Do People Perceive as Election Pledges?. *Electoral Studies*, 57(1), 121-130.
- Elwan, L. O. M. (2019). Model dan Dampak Mobilisasi Politik Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus: Desa Bontomatinggi Kabupaten Maros Sulawesi Selatan Tahun 2016). *Journal Publihuo*, 1(4), 1-17.
- Fahmi, M. H., & Fauzi, A. M. (2020). Perilaku Pemilih Masyarakat Kabupaten Lamongan pada Pilpres 2019. *Jurnal Paradigma*,

- 9(1), 55-63.
- Fan, X., & Yan, F. (2019). The Long Shadow: Social Mobility and Political Participation in Urban China, 2006-2012. *Social Science Research*, 81(1), 106-116.
- Fuad, A. B. B. (2014). Political Identity and Election in Indonesian Democracy: A Case Study in Karang Pandan Village-Malang, Indonesia. *Procedia Environmental Sciences*, 20(1), 477-485.
- Gaebler, S., Potrafke, N., & Roesel, F. (2020). Compulsory Voting and Political Participation: Empirical Evidence from Austria. *Regional Science and Urban Economics*, 81(1), 103-109.
- Gafur. (2019). Pengaruh Gender terhadap Kesadaran Politik Siswa Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(1), 207-214.
- Garmann, S. (2017). Election Frequency, Choice Fatigue, and Voter Turnout. *European Journal of Political Economy*, 47(1), 19-35.
- Gofur, A., & Sunarso. (2019). Pengaruh Literasi Media Massa Online terhadap Civic Engagement Politik Aktivis Mahasiswa. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), 215-220.
- Hammett, D., & Jackson, L. (2018). Developing a 'Civil' Society in Partial Democracies: In Civility and a Critical Public Sphere in Uganda and Singapore. *Political Geography*, 67(1), 145-155.
- Hartati, A. Y., & Wahyuni, Y. (2020). Oligopoli di Negara Demokrasi: Praktek dan Kepentingan Ekonomi Politik Media Massa di Australia. *Spektrum*, 18(1), 1-23.
- Hermawan, I. C. (2020). Implementasi Pendidikan Politik pada Partai Politik di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Politik, Hukum dan Kewarganegaraan*, 10(1), 23-34.
- Hooghe, M., & Stiers, D. (2016). Elections as a Democratic Linkage Mechanism: How Elections Boost Political Trust in a Proportional System. *Electoral Studies*, 44(1), 46-55.
- Khoban, Z. (2019). What Citizens Learn from Elections: The Normative Consequences of Voter Eligibility. *Electoral Studies*, 62(1), 112-120.
- Kurniasih, D. (2020). Pendidikan Politik Pemilih Muda dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Bandung Tahun 2019. *Indonesian Community Service and Empowerment*, 1(1), 16-21.
- Lappie, J., & Marschall, M. (2018). Place and Participation in Local Elections. *Political Geography*, 64(1), 33-42.
- Li, J., Xi, T., & Yao, Y. (2019). Empowering Knowledge: Political Leaders, Education, and Economic Liberalization. *European Journal of Political Economy*, 1(1), 12-16.
- Li, X. (2020). The Critical Assessment of the Youth Policy and Youth Civic Engagement in Denmark and Three Danish Municipalities. *Children and Youth Services Review*, 110(1), 12-21.
- Mann, C. B., & Bryant, L. A. (2020). If You Ask, They Will Come (To Register and Vote): Field Experiments with State Election Agencies on Encouraging Voter Registration. *Electoral Studies*, 63(1), 131-142.
- Miaz, Y. (2012). *Partisipasi Politik: Pola Perilaku Pemilih pada Masa Orde Baru dan Reformasi*. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Nababan, R., Jekrina, U., & Pinem, A. P. (2019). Hubungan Sosialisasi Politik dengan Partisipasi Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Dairi Kecamatan Gunung Sitember. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(1), 1-12.
- Patmisari, Sumarsih, E. J., & Bambang, Y. (2020). Peningkatan Partisipasi Politik dalam Kerangka Otonomi Desa. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(2), 213-225.
- Perdana, G. (2019). Hak Rakyat dalam Mekanisme Pembubaran Partai Politik di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(1), 61-80.
- Predescu, M., & Darjan, I. (2010). Promoting Political Participation through Adult Education. *Procedia Social and Behavioral Sciences*, 2(2), 3241-3245.
- Remer-Bollow, U., Bernhagen, P., & Rose, R. (2019). Partisan Consequences of Low Turnout at Elections to the European Parliament. *Electoral Studies*, 59(1), 87-98.
- Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092.

- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.
- Ridha, M., & Riwanda, A. (2020). Literasi Media, Literasi Politik, dan Partisipasi Kewarganegaraan Pemilih Pemula di Era Digital. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(1), 110-121.
- Riung, W. (2019). Perilaku Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2018 Kabupaten Kepulauan Talaud di Kecamatan Khusus Miangas. *Jurnal Politico*, 8(3), 81-90.
- Scott, C., & Medeiros, M. (2020). Personality and Political Careers: What Personality Types are Likely to Run for Office and Get Elected?. *Personality and Individual Differences*, 152(1), 142-150.
- Suryana, Y. (2020). Pengaruh Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak terhadap Budaya Politik. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 29(1), 13-28.
- Suryani & Azmy, A. S. (2020). Political Identity and Multiculturalism Strengthening Political Identity of Chinese in a Post New Order. *Perspektif*, 9(2), 183-194.
- Syuhada, O. (2020). Fenomena Budaya Politik Parokial dan Perwujudan Demokrasi Pancasila dalam Perspektif Hukum Tata Negara. *Presumption of Law*, 1(2020), 72-115.
- Tjilen, A. P. (2019). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. *Monograf*, 6(1), 66-72.
- Utami, A. F., Bangun, Y. R., & Lantu, D. C. (2014). Understanding the Role of Emotional Intelligence and Trust to the Relationship between Organizational Politics and Organizational Commitment. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 115(1), 378-386.
- Valentina, T. R. (2009). Peluang Demokrasi dan Peta Perilaku Pemilih terhadap Partai Politik untuk Pemilu 2009 di Yogyakarta. *Jurnal Demokrasi*, 8(2), 167-186.
- Vinarski-Peretz, H., & Kidron, A. (2018). The Shadow Dance of Political Climate: Engagement in Political Behavior in Local Government Authorities. *European Management Journal*, 36(5), 608-615.
- Wang, T. Y. (2019). Generations, Political Attitudes and Voting Behavior in Taiwan and Hong Kong. *Electoral Studies*, 58(1), 80-83.
- Winarni, E. D. (2020). Strategi Pemberdayaan Kelembagaan Desa. *Jurnal Ilmiah Perlindungan dan Pemberdayaan*, 2(1), 1-19.